



Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Prita Amalia, Yogi Suprayogi, Yudi Azis, Wawan Hermawan,
Eksa Pamungkas, Adi Nurzaman, Anhar Fauzan Priyono

Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

Corresponding author:
prita.amalia@unpad.ac.id

ABSTRACT

Infrastructure projects are expected to deliver positive economic and social impact to the community. However, the model to analyze the economic and social impact is still limited. Therefore, this study aims to develop an economic and social impact model to be used for study the impact of infrastructure projects. The research focuses on several case studies of infrastructure projects which guaranteed by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) both PPP (Public-Private-Partnership) Scheme and non-PPP Scheme on telco, water, tourism Sector. These sectors are believed to represented the major infrastructure development that cover both local, national, and international perspectives. The analytical method used to measure economic impacts from infrastructure development is a quantitative approach by using following attributes: Sectoral Economic Analysis, Potential Economic Analysis, Growth Accounting, Input-Output Table Analysis, and Statistical Forecasting. While, to analyse the social impact of infrastructure development, quantitative and qualitative approaches are used by In-depth Interview through questionnaire filling technique and Social Impact Assessment (SIA) method. In addition, this study also used legal approach method. The results show various economic impacts of project investment development, both in terms of potential and realization. Meanwhile, in terms of social impacts, there are various community responses to the realization of project development.

Keywords: Economic-Sosio Impact, infrastructure project, case study

SARI PATI

Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomunikasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek.

Kata Kunci: Dampak sosial-ekonomi, proyek infrastruktur, studi kasus

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur publik di suatu negara dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan pangsa pasar, menciptakan lapangan pekerjaan, terciptanya lingkungan yang kompetitif dan memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih baik dengan konektivitas masyarakat akan kesempatan yang ada. Infrastruktur publik ini mengacu pada struktur, sistem, dan fasilitas yang melayani ekonomi bisnis, industri, negara, kota, atau daerah, termasuk layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas perekonomian berjalan dengan baik.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero; PT PII) didirikan oleh Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas proyek infrastruktur baik dari tahap penyiapan, transaksi dan pelaksanaan proyek. Pada tahun 2018 PT PII telah melakukan kajian komprehensif pada beberapa proyek infrastruktur seperti telekomunikasi, air minum, jalan (tol), transportasi (perkeretaapian), jalan (non tol), transportasi (pelabuhan) dan kesehatan yang juga mengkaji aspek keekonomian dan aspek dampak sosialnya. Adapun skema yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur adalah Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU dijalankan dengan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, pengendalian dan pengelolaan risiko dan efisiensi. Adanya skema KPBU ini bukan berarti tidak akan menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia mendirikan PT PII dilatarbelakangi kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pendirian PT PII diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas proyek infrastruktur, bukan hanya dalam bentuk

memberian penjaminan tetapi juga melalui peningkatan kualitas penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan proyek, sesuai dengan praktik terbaik yang bermanfaat bagi seluruh pemegang kepentingan. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, tepat dan bermanfaat merupakan bagian dari rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals*. Melalui pembangunan proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi maupun sosial yang positif kepada masyarakat.

Studi terhadap dampak ekonomi dan sosial yang dimunculkan oleh proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan mampu mengurai elemen-elemen proyek berdasarkan biaya finansial dan ekonomis yang dibutuhkan serta manfaat-manfaat yang akan ditimbulkan bagi regional dan nasional. Studi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran atas dampak realisasi proyek-proyek infrastruktur untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan.

Kajian Pustaka

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap negara selalu berupaya untuk menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Melalui pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam

kehidupan. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial.¹

Pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan potensi-potensi yang terdapat dalam suatu wilayah seperti sektor-sektor yang menjadi unggulan dan aspek pendanaan pemerintah. Perencanaan pembangunan terbagi menjadi dua yaitu pembangunan wilayah dan sektoral. Pembangunan sektoral melibatkan sektor-sektor yang unggul sedangkan pendekatan regional melibatkan daerah yang masih tertinggal sehingga daerah tersebut sangat perlu untuk dikembangkan dan kemudian melibatkan sektor-sektor yang memiliki potensi unggul untuk dikembangkan. Berdasarkan survei lapangan, pendekatan regional sering mengambil beberapa daerah tertentu seperti daerah pinggiran, daerah terbelakang, dan daerah yang memiliki strategis, sebagai objek dalam lingkup ekonomi dan politik yang ditujukan untuk menggabungkan pendekatan sektoral dengan pendekatan regional.

Pembangunan wilayah harus melibatkan dimensi sektoral dan dimensi spasial, begitu juga dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus melibatkan sektor-sektor yang dapat memperhatikan perkembangan infrastruktur dalam waktu panjang sehingga dapat diketahui pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan atau tidak. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemetaan pada perkembangan atau kebutuhan infrastruktur tiap wilayah. Hasil dari pemetaan akan menentukan sektor-

sektor yang diutamakan untuk di kembangkan. Dampak pembangunan infrastruktur di suatu daerah yang sesuai akan kebutuhan daerah dapat meningkatkan terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya.²

Capello menjelaskan hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang mana infrastruktur merupakan faktor dalam penentuan daya saing dan produktivitas. Infrastruktur ekonomi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional, sedangkan infrastruktur sosial berdampak langsung pada kualitas hidup dan modal manusia, sehingga akan berpengaruh pada produksi hanya dalam jangka panjang dan efeknya tidak hanya berdampak pada area yang dibangun infrastruktur sosial tersebut³

Agenor menerangkan infrastruktur memiliki dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat khususnya terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dampak dari infrastruktur terhadap pembangunan beragam polanya. Ada infrastruktur yang menunjukkan dampaknya pada penurunan biaya produksi, atau meningkatkan kesehatan dari setiap individu. Asumsinya terdapat pengaruh infrastruktur yang positif dan nonlinier berhubungan dengan kekayaan publik (masyarakat) itu sendiri. Sebagai contoh, pada infrastruktur pelayanan kesehatan, infrastruktur dikatakan meningkatkan kemampuan ekonomi apabila aksesibilitas layanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga berdampak positif terhadap produktivitas pekerja dan output ekonomi. Lebih lanjut, hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas efektivitas pekerja selain dari daya kemampuan pendidikannya.⁴

1 Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 63.

2 Robinson, T., *Ekonomi Regiona: Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta 2005.

3 Capello, R. 2009. Spatial Spillovers and Regional Growth: A Cognitive Approach. *European Planning Studies*, Vol. 17, No. 5, p:639-658.

4 Agenor, P.-R. (2010). A theory of infrastructure-led development. *Journal of Economic Dynamics & Control*, 34, 932-950.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan analisis dampak ekonomi dan sosial atas pembangunan infrastruktur dilakukan beragam pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Proyek-proyek infrastruktur yang dikaji dampaknya dalam kajian ini yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, dan Proyek Palapa Ring, berturut-turut termasuk ke dalam kategori lapangan usaha (sektor ekonomi) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Informasi dan Komunikasi.

Kajian dampak ekonomi merujuk pada teori-teori ekonomi baik ekonomi makro maupun mikro dan pedoman yang dirilis oleh Asian Development Bank⁵ berjudul “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project.” Metode analisis dampak ekonomi ini yaitu (1) analisis perekonomian sektoral berbasis lapangan usaha, (2) analisis potensi ekonomi, (3) pendekatan *Growth Accounting*, (4) model input output (I-O), dan (5) teknik forecasting. Analisis perekonomian sektoral berbasis lapangan usaha diurutkan berdasarkan 17 kode lapangan usaha. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas lapangan usaha (sektor ekonomi) digunakan untuk mengetahui dampak pembangunan suatu infrastruktur terhadap sektor-sektor ekonomi yang terkait. Hal ini dilakukan karena kinerja perekonomian nasional dan daerah (i.e., provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia secara umum diukur melalui kinerja dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional, dan PDRB untuk tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang mana pencatatan PDB dan PDRB dilakukan dengan melalui pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan juga berdasarkan lapangan usaha (sektor ekonomi).

Analisis Potensi Ekonomi dilakukan untuk memberikan gambaran atas profil dari sektor-sektor ekonomi di daerah dalam periode waktu tertentu. Beberapa pendekatan dalam menganalisis potensi ekonomi suatu daerah adalah (a) *Static & Dynamic Location Quotient* (SLQ & DLQ), (b) Analisis *Shift-share Esteban Marquillas* (SS-EM), (c) Tipologi Klassen. Pendekatan *Growth Accounting* merupakan cara yang umum dilakukan, untuk mendekomposisi pertumbuhan dari tiap sektor ekonomi. Model pertumbuhan merujuk pada model Solow yang memberikan pemikiran tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan konsekuensi atas perubahan lingkungan ekonomi dan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi. Model input output (I-O) adalah model yang dapat menjelaskan keterkaitan antar industri/sektor dan kemudian mampu menghubungkannya dengan perkembangan struktur perekonomian. Model I-O yang digunakan adalah model I-O yang dikembangkan oleh Leontief. Dalam melakukan *forecasting* berbagai sektor dan beberapa variabel makro metode/teknik dapat digunakan, salah satunya adalah *Double Exponential Smoothing*.

Untuk menganalisis dampak sosial digunakan metode pengisian angket untuk pengumpulan data dan pendekatan kualitatif yang digunakan adalah *Social Impact Assessment* (SIA). Metode pengisian angket adalah teknik pengumpulan data kajian kuantitatif yang merupakan pengumpulan data yang datanya berupa angka statistik. Adapun target pengisian angket ini adalah masyarakat sekitar yang berada pada lokasi proyek tersebut baik sebagai pengguna atau masyarakat terdampak tersebut proyek. Metode *sampling* yang digunakan adalah *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mana semua individu

5 Asian Development Bank. (2014). ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity. Bangkok: International Labour Organization and Asian Development Bank.

dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Metode SIA yang didasarkan pada penelitian Esteves et al. adalah sebuah proses dalam mengelola masalah sosial yang berkaitan dengan program yang akan direncanakan. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak dan penilaian proyek yang akan dilakukan mencakup banyak bidang, termasuk sosiologi, antropologi, demografi, studi pembangunan, geografi sosial dan budaya, ekonomi, ilmu politik dan hak asasi manusia, komunitas dan psikologi lingkungan, metode penelitian sosial dan hukum lingkungan.⁶

Informan atau narasumber merupakan pihak yang akan diwawancarai sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kajian. Informan dibagi atas dua yaitu: pelaksana proyek dan pihak yang terkena dampak. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh valid dan dari semua perspektif. Adapun rincian dari narasumber/informan dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam penelitian ini juga digunakan *Regulatory Impact Assessment* (kadang disebut juga *Regulatory Impact Analysis*; RIA) untuk aspek legal. Metode ini merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan suatu aturan. RIA bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. Analisis RIA melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena pengaruh dari sebuah regulasi yang akan digulirkan. Hasil analisis RIA ditulis dalam sebuah laporan yang disebut *RIA Statement* yang dilampirkan pada rancangan regulasi yang diajukan. RIA terdiri dari tujuh langkah atau tahapan sebagai berikut: (1) merumuskan masalah; (2) merumuskan tujuan; (3) mengidentifikasi alternatif tindakan; (4) menganalisis manfaat dan biaya; (5) berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan; (6) menyusun strategi implementasi; dan (7) menuliskan semua proses analisa dalam sebuah laporan RIA. Dalam kajian dampak ekonomi dan sosial ini, metode RIA

Palapa Ring		KEK Mandalika		SPAM Umbulan	
Kabupaten Pulau Morotai		Kabupaten Lombok Tengah		Desa Sidepan	
Pelaksana Proyek	Pihak yang terkena Dampak	Pelaksana Proyek	Pihak yang terkena Dampak	Pelaksana Proyek	Pihak yang terkena Dampak
Narasumber Badan Usaha Pelaksana (BUP)	Narasumber Perwakilan Masyarakat	Narasumber BUP	Narasumber Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Narasumber BUP	Narasumber Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
	Narasumber Diskominfo Kabupaten dan ISP (Internet service provider)	Narasumber Bappeda Provinsi	Narasumber Perwakilan Masyarakat	Narasumber Bappeda Kabupaten	Narasumber Perwakilan Masyarakat

⁶ Esteves, A., Franks, D., & Vanclay, F. *Social impact assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal*, 30, 2012, hlm 34 - 40.

juga digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai suatu tujuan pembuat peraturan perundang-undangan untuk pembangunan infrastruktur, peraturan dibuat untuk dapat melaksanakan program dengan tujuan peningkatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, norma yang disusun dalam peraturan seharusnya dapat dijadikan acuan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa dampak pembangunan infrastruktur Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika:

- Keberadaan sirkuit internasional Mandalika memberikan peningkatan dalam kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- Peningkatan pemanfaatan dari sarana pariwisata akibat peningkatan kunjungan wisatawan, akan berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah daerah berupa pajak daerah yang terkait pariwisata.
- Indikator makro ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai sifat yang lebih sensitif terhadap perubahan indikator-indikator ekonomi lainnya, baik internal, maupun eksternal. Oleh karena itu, pembangunan KEK Mandalika diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan yang signifikan dalam PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peranan yang lebih rendah terhadap perekonomian di Provinsi tersebut jika dibandingkan dengan peranan sektor yang sama terhadap perekonomian rata-rata nasional.
- Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi perkembangan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peranan sektor yang sama pada rata-rata nasional.
- Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi, namun rendah untuk keunggulan spesialisasi.
- Merujuk pada analisis Tipologi Klassen, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terkategori sektor yang potensial (masih dapat berkembang secara pesat-kuadran 3) selama periode tahun 2013–2017, relatif terhadap sektor yang sama pada rata-rata nasional.
- Peningkatan permintaan atas penginapan (tingkat okupansi hotel berbintang di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengakibatkan peningkatan kinerja dalam sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,74%.
- Tiga sektor ekonomi yang mendapat dampak paling besar sebagai akibat peningkatan sebesar 13,74% pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
 - Pengadaan Listrik dan Gas: 1,21%
 - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan: 0,99%
 - Informasi dan Komunikasi: 0,53%
- Penyerapan tenaga kerja sangat dimungkinkan untuk mendatangkan pekerja dari luar Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dikarenakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 sebesar 3,74%, sementara keperluan tenaga kerja baru adalah sebesar 11,4%.
- Perubahan sebesar 29,78% pada konsumsi rumah tangga atas sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB

Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 0,77%.

Sementara itu, dampak pembangunan Proyek KPBU SPAM Umbulan Jawa Timur antara lain:

- Pembangunan SPAM Umbulan belum dapat menjadikan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang meningkatkan signifikansi kinerja terhadap sektor lain. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang masih merupakan kontributor terkecil di antara 16 sektor perekonomian lainnya.
- Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan kompetitif yang rendah, namun tinggi untuk keunggulan spesialisasi.
- Dampak peningkatan permintaan air bersih rumah tangga sebagai akibat pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan hasil proyeksi) secara berturut-turut adalah 0,07%; 0,28%; dan 0,08%.
- Di lain pihak, simulasi juga dilakukan dengan memanfaatkan instrumen *capital expenditure* (CAPEX) sebagai dasar *shock*. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa CAPEX SPAM Umbulan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 0,08%, yang hasilnya linier dengan simulasi yang memanfaatkan penyaluran debit air di atas.
- Peningkatan pasokan air bersih memberikan dampak atas peningkatan akses terhadap air bersih. Akses Air bersih yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Di samping peningkatan aspek kesehatan, peningkatan daya beli akibat dari kesehatan yang baik dapat meningkatkan IPM di lima kabupaten kota di Jawa Timur.
- Peningkatan pasokan air bersih

memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh adanya peningkatan pengadaan air bersih yang terserap, dapat memberikan dampak pertumbuhan IPM di sekitar 0,025% pada lima kabupaten/kota atau naik 0,027% untuk tingkat Provinsi Jawa Timur.

- Penyerapan tenaga kerja lokal akibat adanya SPAM Unggulan relatif rendah.
- Pendapatan Pajak Air Permukaan diproyeksikan dapat mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
- SPAM Umbulan memberikan dampak atas kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat sebagai dampak terpenuhinya sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dampak Pembangunan Infrastruktur Proyek KPBU Palapa Ring yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi cukup banyak berkontribusi oleh Sektor Jasa Informasi dan Telekomunikasi, sehingga Proyek Palapa Ring dapat berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperkirakan terakselerasi pada masa yang akan datang.
- Peningkatan Jasa Telekomunikasi pada tahun 2022 berdasarkan skenario *Business as Usual*, dengan asumsi peningkatan permintaan rumah tangga atas jasa telekomunikasi sebesar 2,19%, tahun 2022 diproyeksikan dapat menciptakan tambahan penyerapan tenaga kerja sebesar 421.460 orang.
- Pembangunan infrastruktur Palapa Ring diperkirakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,04%
- Tiga sektor ekonomi yang terdampak paling besar sebagai akibat pembangunan infrastruktur Palapa Ring adalah sebagai berikut:
 - Jasa Telekomunikasi (1,22%)

- Jasa Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi (0,1%)
- Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis (0,07%)

Hasil kajian dampak sosial didapatkan informasi bahwa pada SPAM Umbulan untuk aspek peningkatan kualitas hidup, aspek hubungan dengan masyarakat, dan aspek konflik antara masyarakat dan pihak pengelola masuk ke dalam kategori rendah. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut belum terpenuhi dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Untuk Palapa Ring di Kabupaten Pulau Morotai, aspek peningkatan kualitas hidup, aspek hubungan dengan masyarakat, dan aspek konflik antara masyarakat dan pihak pengelola semuanya masuk ke dalam kategori tinggi. Oleh sebab itu, ketiga aspek tersebut sudah terpenuhi dalam Proyek Infrastruktur Palapa Ring di Kabupaten Pulau Morotai. Pada KEK Mandalika dari aspek peningkatan kualitas hidup termasuk ke dalam kategori tinggi, yang dapat diartikan bahwa aspek peningkatan kualitas hidup Proyek Infrastruktur KEK Mandalika sudah terpenuhi. Selain itu, untuk aspek hubungan dengan masyarakat, aspek keramahan terhadap kaum rentan/lemah masuk ke dalam kategori sangat tinggi, dapat diartikan bahwa kedua aspek tersebut sangat terpenuhi pada proyek infrastruktur KEK Mandalika. Sedangkan dari aspek konflik antara masyarakat dan pihak pengelola masuk ke dalam kategori rendah. Dengan demikian, pada proyek infrastruktur KEK Mandalika aspek konflik antara masyarakat dan pihak pengelola belum terpenuhi.

Metode kualitatif dilakukan dengan *in-depth interview* beberapa informan terkait. Dampak sosial pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan sebagai berikut:

- Pengelolaan SPAM Umbulan yang merupakan proyek strategis nasional membuat kewenangan terpusat pada Pemerintah Pusat sehingga, Pemerintah

Kabupaten Pasuruan terbatas dalam hal mengkoordinasikan infrastruktur tersebut. dalam memanfaatkan sumber air minum di daerahnya.

- Semenjak adanya SPAM Umbulan, masyarakat yang berada di sekitar SPAM Umbulan (Desa Umbulan dan Desa Sidepan) justru kesulitan mendapatkan akses air bersih.
- *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh BUP SPAM Umbulan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat sekitar berkeinginan agar CSR yang diberikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekitar SPAM Umbulan

Untuk pembangunan Palapa Ring di Kabupaten Morotai, dampak sosialnya antara lain:

- Proyek Palapa Ring di Kabupaten Pulau Morotai membantu meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi masyarakat setempat.
- Proyek Palapa Ring Kabupaten Pulau Morotai memberikan manfaat dalam penyelenggaraan *e-government* Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, sehingga pemerintah daerah berinisiatif membuat *Morotai Command Center*.
- Proyek Palapa Ring Kabupaten Morotai secara tidak langsung membantu Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Untuk pembangunan KEK Mandalika, dampak sosialnya yaitu:

- Dampak positif yang dirasakan oleh pedagang yang berada di sekitar sirkuit Mandalika adalah peningkatan omset yang diperoleh selama pelaksanaan *event*.
- Dampak negatif yang dirasakan oleh warga yang berada sekitar pembangunan sirkuit Mandalika adalah terhambatnya akses jalan yang dimiliki warga (Dusun Ebunut), terhambatnya pelaksanaan prosesi budaya

desa sekitar (Desa Kuta dan Desa Rembitan) karena berkurangnya akses pantai untuk umum.

- Bentuk CSR yang dilaksanakan oleh PTITDC selaku BUP adalah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang berminat. Pelatihan yang ada dapat mendukung keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat di luar *event* balap, seperti: kewirausahaan, pemasaran digital, dan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Pelatihan tersebut secara umum dapat membantu mengisi kesenjangan aktivitas warga sekitar tanpa harus mengandalkan *event* balap.
- Pembangunan KEK Mandalika berpotensi menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan lahan. Permasalahan lahan tersebut terjadi karena adanya pembayaran ganti rugi lahan warga belum sesuai dengan yang diinginkan kedua belah pihak sehingga menyebabkan kebuntuan komunikasi kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya di lingkungan sekitar infrastruktur tersebut dibangun.

Dalam konteks ekonomi, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut. (1) Diperlukan identifikasi aset daerah (lokasi pembangunan infrastruktur) untuk mengetahui kemampuan daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, maupun aspek fisik dan finansialnya, serta karakteristik demografis dari masyarakat di sekitar. (2) Dilakukan analisis atas urgensi rencana pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan nasional pada umumnya. Analisis potensi ekonomi, serta analisis

keunggulan kompetitif dan spesialisasi dapat membantu analisis tersebut. Luaran dari analisis tersebut adalah membantu pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang sesuai di suatu lokasi. (3) Diperlukan analisis hubungan saling ketergantungan antarsektor dalam perekonomian (yang mana posisi infrastruktur tersebut terkategori dalam sektor perekonomian tertentu), baik *backward* maupun *forward linkage* untuk mengetahui seberapa optimal dampak yang mampu diberikan pada sektor-sektor perekonomian lainnya.

Beberapa rekomendasi terkait studi kelayakan proyek infrastruktur adalah: (1) Asumsi yang mendasari proyeksi-proyeksi baik dalam aspek ekonomi, maupun finansial, perlu dipertimbangkan lebih lanjut, utamanya pemilihan proksi dan pemanfaatan data tertentu yang dapat memengaruhi analisis sensitivitas dalam dokumen studi kelayakan. Hal ini lebih menjadi krusial disebabkan perbedaannya dengan *Detailed Engineering Design* yang lebih statis dan non-normatif, yang mempermudah proses perhitungannya. (2) Jika asumsi-asumsi tersebut yang kemudian memengaruhi target-target pencapaian atas pembangunan infrastruktur tersebut telah ditetapkan, diperlukan: (a) Meningkatkan kualitas komunikasi antara pusat dan daerah, dalam aspek kepentingan pembangunan infrastruktur, skema pembiayaan, dukungan pemerintah, optimalisasi keterlibatan daerah (pemerintah daerah dan masyarakat sekitar), dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. (b) Monitoring dan evaluasi tiap periode yang dapat mengikuti proses monitoring dan evaluasi dalam sistem pemerintahan seperti Rencana Kerja (Renja) yang merupakan agenda tiap tahun sebagai bagian dari Rencana Strategis). Bagian yang belum tercapai dalam suatu periode akan cepat diketahui untuk dapat diakselerasikan pada periode berikutnya. (c) Pemantauan penerapan peraturan (regulasi)

yang mengikat pembangunan dan pemanfaatan suatu infrastruktur dalam meminimalkan potensi target yang menyimpang dalam studi kelayakan. Aspek teknis yang diatur dalam peraturan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dapat saja berbeda untuk tiap sektor dalam perekonomian, yang diharapkan mampu menyesuaikan dengan dinamika yang muncul di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian di atas, untuk penilaian potensi ekonomi dan potensi sosial pembangunan infrastruktur selanjutnya, perencanaan harus dibuat dengan melihat kepada potensi optimis dan pesimis. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan studi kelayakan dapat dibuat beberapa skenario dalam proyek infrastruktur tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga merekomendasikan untuk adanya keterlibatan

atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur baik melalui skema KPBU atau non-KPBU. Beberapa pertimbangan diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yakni bertujuan: (1) Menguatkan peran masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur, karena di proyek infrastruktur ini akan terus berdampingan dengan masyarakat. Teknis pelaksanaannya dapat berupa diskusi dalam forum terbatas yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang koheren dengan jenis infrastruktur yang akan dibangun. (2) Masyarakat dapat memberikan aspirasi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi setempat, khususnya dalam konteks pelatihan-pelatihan dan unsur lainnya yang paling sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam bentuk CSR.

REFERENSI

- Asian Development Bank. (2014). *ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity*. Bangkok: International Labour Organization and Asian Development Bank.
- Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2021). Diresmikan Presiden, SPAM Umbulan Tingkatkan Layanan air Bersih Di 5 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Kementerian PUPR. <https://pu.go.id/berita/diresmikan-presiden-spam-umbulan-tingkatkan-layanan-air-bersih-di-5-kabupatenkota-di-jawa-timur>
- Bryan S. Turner, Abercrombie, Nicholas., & Hill Stephen. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Briceno, C., Estache, A., & Shafik, N. T. (2004). *Infrastructure services in developing countries: Access, quality, costs, and policy reform*. Policy Research Working Papers. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3468>
- Djazifah, Nur. (2012). *Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwi P., Rahmat. (2015). *Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Jurusan Sosiologi , Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik : Universitas Sriwijaya
- Dye, Thomas R, (2005), *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc.).
- Esteves, A., Franks, D., & Vanclay, F. (2012). *Social impact assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal*, 30, 34 - 42.
- Fardani, Andi. (2012). *Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Universitas Hasanuddin: Jurusan Sosiologi FISIP.
- Galih Lintartika. (2018, July 12). Bupati Pasuruan Kirim Surat Ke Jokowi, Minta Peninjauan Kembali Proyek SPAM Umbulan. *Suryamalang.com*. <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/12/bupati-pasuruan-kirim-surat-ke-jokowi-minta-peninjauan-kembali-proyek-spam-umbulan>
- Gaynor Patricia E., Rickey C. Kirkpatrick, (1994) *Introduction to Time Series Modelling and Forecasting in Business and Economics, International Edition*, McGraw-Hill International, (hal. 298)
- Gujarati, Damodar, (2003), *Basic Econometrics, 4th Edition*, McGraw-Hill International, (hal. 807-812)
- Hanke, Wichern, dan Reitsch, (2002), *Business Forecasting, 7th edition*, Prentice-Hall, India, (Hal. 72)
- Henri Subiakto, (2013) *Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat*, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 26, No.4, hal. 243-25
- Jayadinata, Johara dan Pramandika, (2006), *Pembangunan desa dalam perencanaan*, Bandung: Penerbit ITB
- Kai Hauerstein & Peter Bissegger, (2009). *Training Manual Regulatory Impact Assessment*, Jakarta: GTZ-Red and Bappenas RI, hlm. 7.
- Kodoatie, R.J. (2003), *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- KOMINFO, P. (2013, 10). *Sekilas Palapa ring*. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/p>
- Robinson, T. (2005). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Setiadi, Elly M. (2006). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto. (2006). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suska. (2011). *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 359.
- The World bank. (1994). *World Development Report: Infrastructure For Development*. Oxford University Press, New York.
- Todaro, Michael. (2001). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Vanclay, F. (2019). *Reflections on social impact assessment in the 21st century. Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(2), 126-131. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1685807>
- Wiryoandoyo, Sudarno. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Wulansari, Dewi. (2009). *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama.